

BAB V

PENUTUP

Di bagian penutup tesis ini, penulis akan menyajikan rangkuman kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan menjelaskan usul dan saran dengan harapan bahwa dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang menciptakan kehidupan masyarakat yang layak manusiawi.

5.1. Kesimpulan

Keputusan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia dengan membangun infrastruktur melanjutkan praktik politik pembangunan gaya lama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sejak zaman presiden Soeharto. Kebijakan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk "penyangkalan" Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap nawacita yang berisi sembilan poin, yang merupakan cerminan dari pola *human development* (pembangunan manusia). Dengan demikian, nawacita sebagai propaganda politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah berhasil menipu masyarakat Indonesia.

Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta investasi asing. Keterlibatan berbagai lembaga penyedia dana ini membuat anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi sangat besar. Selain didukung oleh pembiayaan yang signifikan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menetapkan sejumlah kebijakan yang dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti melakukan revisi terhadap Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Cipta Kerja.

Pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain mencakup keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur transportasi, energi, fasilitas air bersih dan sanitasi, perumahan, serta pembangunan pos lintas batas negara dan sarana untuk Asian Games. Sementara itu, dampak negatifnya meliputi permasalahan agraria terkait pembebasan lahan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kasus-kasus korupsi, serta meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dalam bidang ekonomi dan investasi.

Dari gambaran politik pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla di atas, kemudian penulis melakukan tinjauan teologis dalam terang ensiklik *Populorum Progressio*. Temuan penulis bahwa strategi politik pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meningkatkan sektor ekonomi demi menaikkan presentasi produk domestik bruto (PDB) adalah kurang tepat. Penulis menemukan bahwa dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah terjadi, justru ditemukan pelanggaran pada aspek kemanusiaan masyarakat. Sumber utama munculnya permasalahan ini adalah kesalahan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, seharusnya sektor ekonomi menjadi pelayan masyarakat, bukan masyarakat melayani sektor ekonomi.

Dalam ensiklik *Populorum Progressio*, Paus Paulus VI menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kondisi kehidupan yang layak dan bermartabat bagi manusia. Pada bagian nomor 14 ensiklik tersebut, beliau menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh dipisahkan dari dimensi kemanusiaan maupun dari perkembangan peradaban yang menjadi ruang hidupnya. Hal yang paling utama adalah manusia itu sendiri—baik sebagai individu, kelompok sosial, maupun sebagai umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang menjadi prioritas dalam pembangunan bukanlah aspek ekonominya, melainkan manusia sebagai subjek utamanya.

Adapun secara teologis, dukungan Paus Paulus VI pada pembangunan manusia dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang layak manusiawi

berdasar pada nilai teologis; bahwa setiap manusia diciptakan menurut citra Allah. Ia berpegang pada prinsip fundamental bahwa segala sesuatu merupakan bagian dari rencana Allah, dan bahwa setiap individu dipanggil untuk tumbuh serta mewujudkan dirinya secara utuh, karena setiap kehidupan memiliki makna sebagai suatu panggilan Ilahi. Sehingga bentuk tertinggi dari perkembangan manusia dicapai melalui persatuan dengan Kristus. Dengan demikian dalam bahasa yang sederhana, sejauh kemajuan duniawi dapat memberikan kontribusi bagi tatanan masyarakat manusia yang lebih baik, merupakan perhatian penting bagi kerajaan Allah. Ajakan Paus Paulus ini menunjukkan nilai tertinggi dari perilaku manusia dalam pembangunan adalah mendukung terciptanya kondisi pembangunan yang layak manusiawi sebagai representasi penghormatan terhadap Allah.

Adapun konsep pembangunan menciptakan kondisi hidup masyarakat yang layak manusiawi yang ditawarkan Paus Paulus VI adalah: *Pertama*, pentingnya pembangunan integral yang mencakup manusia seutuhnya. *Kedua*, pembangunan harus menghormati martabat manusia sebagai gambar atau citra Allah. *Ketiga*, pemerintah harus menjadi pendamping masyarakat. *Keempat*, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi mendukung pelaksanaan pembangunan yang adil antara generasi. *Kelima*, dalam kerja sama negara maju dan negara berkembang harus berdasar pada asas keadilan dan solidaritas, dan negara maju hadir sebagai penolong bagi negara berkembang.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai salah satu referensi dalam merancang dan menjalankan program pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang bertujuan menciptakan kondisi hidup yang layak dan bermartabat bagi seluruh warga.

5.2. Usul Saran

Penerapan strategi politik pembangunan yang menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang layak manusiawi atau pembangunan manusia, menjadi jawaban dari politik pembangunan dewasa ini. Kemudian, orientasi pembangunan pada pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi dengan membangun infrastruktur sebagaimana dilakukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tetap masuk

dalam kategori pilihan pembangunan. Akan tetapi, imbas dari sistem pembangunan macam ini adalah cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan. Maka dari itu, perlu transformasi pembangunan manusia, menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang layak manusiawi. Oleh sebab itu, penting kerja sama dan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat.

Pertama, untuk pemerintah. Pemerintah hendaknya berani melaksanakan program politik pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Program pembangunan pemerintah harus menciptakan struktur pembangunan sektor ekonomi melayani manusia. Yang penting adalah pembangunan bertolak dari pertimbangan aspek menghargai martabat manusia, menciptakan solidaritas, menngluarkan kebijakan yang adil dan mengupayakan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, maka masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek dari pembangunan, selain itu, penulis menyakini bahwa kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah akan adil antara generasi. Alhasil, bukan saja pembangunan infrastruktur yang megah tercipta, melainkan kehidupan masyarakat dari masyarakat yang sejahtera

Kedua, untuk masyarakat. Masyarakat harus berani bersuara terhadap bentuk pembangunan yang menindas martabat masyarakat. Sebab masyarakat adalah subjek pembangunan bukan objek dari pembangunan. Sehingga terhadap semua bentuk pelanggaran kemanusiaan sebagai dampak pembangunan harus ditentang. Sebab, suara masyarakat menjadi strategi mengendalikan kebijakan program pembangunan yang tidak adil. Adapun cara penyaluran suara masyarakat adalah dengan melaporkan segala tindakan pembangunan yang tidak benar dan tidak adil kepada pemerintah atau pihak berwajib. Selain itu, untuk ketidakadilan pembangunan yang besar, dapat diatasi melalui tindakan berdemonstrasi secara damai tanpa tindakan anarkis.

Ketiga, untuk negara-negara berkembang. Negara berkembang dalam memilih partner kerja sama dengan negara maju dalam program pembangunan harus benar-benar selektif. Dalam hal ini, yang dipertimbangkan adalah prinsip keadilan dalam kerja sama, kesanggupan dalam mengembailkan utang dan tanpa

harus mengorbankan masyarakat. Kemudian, diusahakan bahwa, kerja sama yang dibangun tidak membuka ruang bagi negara maju (Partner kerja sama) melakukan intervensi dalam pemerintahan negara berkembang. Selain itu, diperlukan pembentukan sistem pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, sehingga alokasi dana pembangunan benar-benar diperuntukkan terciptanya kesejahteraan bersama.

Keempat, untuk negara- negara maju. Negara maju harus menjadi penolong bagi negara-negara berkembang atau negara miskin. Menghadirkan diri sebagai penolong dalam pengertian bahwa negara-negara maju tidak memanfaatkan negara berkembang sebagai lahan eksploitasi kekayaan, untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kemudian, diharapkan negara-negara maju dalam berkerjasama juga ditawarkan untuk berpegang pada prinsip; solidaritas timbal balik, keadilan sosial dan cinta kasih.

Kelima, untuk Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. IFTK Ledalero harus mendorong mahasiswa dan mahasiswi untuk berani memberikan sumbangsih pikiran kritis terhadap segala bentuk kebijakan pembangunan yang menindas masyarakat. Bentuk sumbangsih pemikiran kritis mahasiswa dan mahasiswi ini dapat diterbitkan lewat media publikasi baik bersifat ilmiah maupun nonilmiah, juga bisa dengan cara berdemonstrasi untuk menyuarakan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN DOKUMEN

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium tentang Gereja*, art, 13: S 57, 1965.
- Dokumen Gerejawi. *Gaudium et Spes: Kegembiraan dan Harapan*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Penerangan KWI. 2021.
- Paus Paulus VI. *Populorum Progressio Perkembangan Bangsa-Bangsa*. Penerj. Hardawirjaya. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021.
- Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Buku II, hlm. 493.

II. BUKU-BUKU

- Abas. *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: CV. Lontar Mediatama, 2018.
- Bevans, Stephen B. dan Roger Schroeder. *Constants in Context: A Theology of Mission for Today*. New York: Orbis Books, 2004
- Burnett, Robin dan Vivienne Bath. *Law Of International Business In Australia*. Annandal, N. S. W: The Federation Press, 2009.
- Dorr, Donal. *Option for the Poor: The Church Social Teaching Poor*. Ireland: Gill and Macmilan, 1992.
- Firdaus, Muhammad Syafari, dkk. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah panduan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2013.
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: CV Nur Lina Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020*. Jakarta: ICW April 2022.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). *Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*. Jakarta, 5 Januari 2016.
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.

- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gramedia, 1999.
- Maritain, Jacques. *Humanisme Integral*. penerj. Joseph W. Evans. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1973.
- Mubyartyo. *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Jakarta LP3ES, 2004.
- O'Brien, David J. and Thomas A. Shannon, (eds.). *Pope Paul VI, Populorum Progressio: On the Development of Peoples*. The Documentary Heritage: Orbis Books, 2006.
- Regus, Max. *Menembus Era Kemurungan*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Sasongko, HD. Haryo. *Bung Karno, Nasionalisme dan demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Grafiksi, 2005.
- Savas. *Privatization The key to Better Better Government*. Chatham House Publishers New Jersey, 1987.
- Schulteis, Michael J. *Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Serikat Petani Indonesia. *Catatan Akhir Tahun 2017, Tahun Darurat Agraria; Kedaulatan Pangan Pun Diabaikan; Kemiskinan Tak Tertuntaskan*. Jakarta, 2017.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Sudarsono, Yuwono. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik Sebuah Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Taylor, Charles Margrave. *Secular Age*. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
- T Cahyadi, Krispurwana. *Yohanes Paulus II: Gereja Berdialog*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Taneko, Soleman Biasane. *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Tanner, Norman P. *Konsili-Konsili Gereja: Sebuah Sejarah Singkat*, penerj. Willie Koen. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- THC REVIEW. *Evaluasi dan Agenda Pemerintah Jokowi (2014-2024)*. Jakarta: The habibie Center, 2019.
- Theofany, Selama. *Indeks Hak Asasi Manusia Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019)*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.
- Valley, Paul, ed. *Cita Masyarakat abad 21: Visi Gereja tentang Masa Depan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Wijaya, Deva Eky. *Kemajuan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Era Kepemimpinan Jokowi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juni 2021.

III. JURNAL DAN ARTIKEL

Ahern, Kevin. "The Justice Legacy of Populorum Progressio: a Jesuit Case Study", *Journal of Moral Theology*, 6:1, 2017.

Amalia, Asni. "Analisi Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3:1, 2022.

Andika, Muhammad Tri dan Allya Nur Aisyah. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepemimpinan Ekonomi dan Kedaulatan". *Indonesian perspective*, 2:2, Juli-Desember 2017.

Andorno, Robert. "Gagasan Paradoks tentang Martabat Manusia". *Jurnal Kedokteran dan Filsafat*, 34:3, 2009.

Angelina, Divia dan Krismanti Tri Wahyuni. "Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2019". *Seminar Nasional Official Statistics*. Jakarta Timur: Politeknik Statistika STIS, 2021.

Ariani, V. dkk. "Indikator Praktik Korupsi Pada Industri Konstruksi di Sumatera Barat". *Jurnal Rekayasa Sipil*, 17:1, 2023.

Arief, Anggraeny dan Rizki Ramadani. "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas, jurnal Al-Adalah". *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6:2, Juli 2016.

Astuti, Puji. "Kekerasan Dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan di Bidang Pertanian". *Jurnal Topik Utama*, 39:2, 2011.

Azzahra, Zhafarina Jauza, dkk. "Analisis Hubungan Utang Indonesia dan China Untuk Menghindari Debt Trap Diplomacy". *Journal Of Accounting And Finance Management (JAFM)*, 5:4, September, 2024.

Budiman, Lestanta dan Hastangka Hastangka. "Doktrin Filsafat Jokowi dan Janji Nawacita (Mengurai Gagasan Revolusi Mental)". *Jurnal Pancasila*, 1:2, Januari, 2020.

Budiman, Lestanta dan Hastangka Hastangka. "Nawacita, Pancasila, dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional". *Jurnal Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, 8:2, September 2020.

Cabui, Cornelia Evelin. "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan". *Jurnal Adhikari*, 1:04, April 2022.

- Denar, Benny Denar. "Ekosida, Bunuh Diri Ekologis, dan Kematian Teologi Ekologi". Dalam Max Regus & Fidels Den, (Eds.), *Lakukanlah Semuanya dalam Kasih: Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat*. Jakarta: Obor, 2020.
- Dwi Anggono, Bayu. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020.
- Firmansyah, Amir dan Aris Machmud, Suparj Suparj. "Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 13:2, Desember 2024.
- Hana, Lidwina, "Kapitalisme: Pengaburan Batas Akhir Kontrak jalan Toll di Jadodetadek", *Jurnal Studi Kultural*, 3:1, Januari 2018.
- Hasan, Yunani. "Situasi Politik dan Ekonomi pada Masa Awal Pemerintahan Orde Baru". *Jurnal Forum Sosial*, 7:1, Februari 2014.
- Heidt, Mari Rapela. "Development, Nations, and "The Signs of theTimes:" the Historical Context of Populorum Progressio". *Journal of Moral Theology*, 6:1, January, 2017.
- Hermawan, Dicky, dkk. "Analisis Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4:1, 2024.
- Himes, Kenneth R. "Catholic Social Teaching, Economic Inequality, and American Society," *Journal of Religious Ethics*, 47:2, Juni 2019.
- Ibrahim, Hilmi Rahman. "Privatisasi BUMN: Modal dan Pilihan Kebijakan Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional". *Jurnal Populis*, 2:4, Desember 2017.
- Idris, Julizar dan Achmad Supandi. "Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis, Transparansi". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7:1, Juni 2024.
- Konferensi Nasional Para Uskup Katolik, *Keadilan Ekonomi untuk Semua: Surat Pastoral tentang Ajaran Katolik dan Ekonomi Amerika Serikat*, November 1986.
- Kristian Saragi, Frengky, Desi Albert Mamahit dan Tri Yoga Budi Prasetyo. "Implementasi Pembangunan Tol Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Maritim*, 4:1, 2018.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "REVISI UU NO. 30 TAHUN 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?", *Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 11:8, September 2019.
- Limijan dan M. Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan pembangunan Politik". *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JpeHI)*, 3:2 (2022): 40-59.

- Mawardi, Rafi Aafa. "Dilema Pembangunan di Indonesia". *Jurnal Mengakui Indonesia*, 1:2, Juni 2023.
- Miftahul. "Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang". *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1:2, 2020.
- Mitasari, Ni Putu, I Dewa Ayu Putri Wirantari dan I Ketut Winaya. "Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif dan Berkelanjutan di Desa Tembuku". *Ethics and Journal: Business and Notary*, 1:1, 2023.
- Muhammad Azhar. "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Administrative Law and Governance Journal*, 2: 1, 2019.
- Murdiyana, M. "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Politik Pemerintah*, 18: 2, Agustus 2017.
- Nicola, Alvin. *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia*. Transparency international Indonesia, 2023.
- Nugroho, J, Arif. "Navigating Local Governance Dynamics: Strategies for Effective Research and Innovation Implementation in Pandeglang Banten". *Pinisi Discretion Review Volume*, 7:2, 2024.
- Pakazeni, Irmaline dan Cindy Nabila. "Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia pada Demokrasi di Era SBY dan Jokowi". *The Journalist: Social and Government*, 1:3, September 2020.
- Pambudi, Helmi Dwi Agung dan Nia Kurniasari. "Pengaruh Politik Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1:2, Desember 2021.
- Permatasari I, Amanda dan Hendri Wijaya, J. "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial". *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23:1, 2019.
- Piniliah, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, 8:1, April 2020.
- Pope, Stephen J. "Integral Human Development: From Paternalism to Accompaniment". *Theological Studies*, 80:1, 2019.
- Prabowo, Tri Bagus dan Rezya Agnesica Suhaloho. "Analisis Ketergantungan Indonesia Pada Teknologi Asing Dalam Sektor Energi dan Dampaknya Pada Keamanan Nasional". *Jurnal Lemhannas RI*, 11:1, 2023.
- Prasedyawati, Dhini Rizky dan Nining Indroyono Soesilo. "Pengaruh Pembiayaan dalam Era Presiden Jokowi dan SBY pada Tahun 2010-2019 terhadap Pemerataan Peningkatan Pembangunan Jalan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7:2, Oktober 2022.

- Priambodo, Bayu. "Program Keluarga Harapan Dari perspektif Keadilan Amartya Sen". *Jurnal Politik Indonesia*, 5:1, 2019.
- Putri, Sindy Yulia dan Dairatul Ma'arif. "Kerjasama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt dan Road Initiative". *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9:7, September 2019.
- Rochadi, A.F. Sigit. "Multikulturalisme dan Kekerasan Primordial di Indonesia Dua Dekade Terakhir". *Jurnal Sosiologi*, 1:1, Februari 2020.
- Saputra, Adi dan Taufiqurrahman. "Investasi Dalam Bingkai Politik Luar Negeri Pemerintahan Jokowi Jilid Satu dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia". *Jurnal Perspektif*, 10:2, 2021.
- Sari, Mia Puspita, Damrah Mamang dan Moh Zakky. "Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)". *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3:2, 2021.
- Sedmak, Clemens. "The Soul of Development". *Journal of Moral Theology*, 6:1, January, 2017.
- Simbolon, Nanci Yosepin. "Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019". *Jurnal Mercatoria*, 13:2, Desember 2020.
- Soeleman, Mochdar dan Mohamad Noer. "Nawacita sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015". *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 13:1, Juni 2017.
- Sutrisno, Nandang dan Sagar Aji Poerana. "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo", *Jurnal Hukum*, 3:2, 2020.
- Taum, Yoseph Yapi. "Manusia Indonesia dan Keterpenjaraannya". Paper dibawakan dalam seminar bertema "Meretorik Ulang Indonesia" di Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada 29 Mei 2013.
- Torre, Joseph M. De. "Maritain's 'Integral Humanism' and Catholic Social Teaching," in *Reassessing the Liberal State: Reading Maritain's Man and the State*, ed. T. Fuller dan JP Hittinger. Washington, DC: Catholic University of America Press, 2001.
- Umam, Ahmad Khoirul. "Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki". *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5:2, 2019.
- Umam, Shohebul. "Developmentalisme Gaya Baru dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terpasung". *Jurnal Populika*, 10:2, 2022.
- Witianti, Siti. "Demokrasi dan Pembangunan". *Jurnal Wacana Politik*, 1:1, Maret 2016.
- Yamin, Muhammad dan Shellia Windymadaksa. "Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia Tiongkok". *Jurnal Politik Profetik*, 5:2, (2017): 200-2018.

IV. TESIS, SKRIPSI, ATAU MANUSKRIP

Adani, Muhammad Hilmi. *Kerja Sama Indonesia dengan Tiongkok dalam Sektor TTI (Trade, Tourism, Investment) di Era Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Droesser, Gerhard. *Corruption in Nigeria: A Manifestation of Bad Governance. (A Socioethical Survey in the light of the Social Teachings of the Church; with particular reference to Gaudium et Spes and Populorum Progressio)*. Thesis Doctor of Theology at the Cath-Theol. Faculty of Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Swiss.

Rochimasnaini, Azizia. *Negara dan Kebijakan Publik (Studi Peran Negara Terhadap Kebijakan Investasi Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat Dalam Perspektif Ekonomi Politik)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

V. INTERNET

Anggaran Infrastruktur APBN 2019. <https://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-infrastruktur-apbn-2019/>, diakses 30 Januari 2025.

Christy, Francisca dan Caesar Akbar. “5 Tahun Jokowi Memangkas Subsidi demi Ngebut di Infrastruktur”. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-tahun-jokowi-memangkas-subsidi-demi-negebut-di-infrastruktur>., diakses, 20 Januari 2025.

Firmansyah dan Okvia Nanda. “New Developmentalisme dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019”. [https://Academica.Edu/104939523/NEW Developmentalisme dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019](https://Academica.Edu/104939523/NEW_Developmentalisme_dalam_Pembangunan_Infrastruktur_Pemerintahan_Joko_Widodo_Periode_2014-2019), hlm. 9., diakses, 30 Januari 2025.

Iqbal, Muhammad dan Donald Banjarnahor. Maaf Pak Jokowi, Ada 1.769 Konflik Agraria dan 41 Orang Tewas. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190218154814-4-56191/maaf-pak-jokowi-ada-1769-konflik-agraria-dan-41-orang-tewas>., diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Iswari Anggit Pramesti, Sederet Bukti Konkret Pembangunan Era Jokowi. <https://www.cnbcindonesia.com/news/2019021423837-4-55506/sederet-bukti-konkret-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi>., diakses, 22 Januari 2025.

Januarius Kuwado, Fabian dan Inggried Dwi Wedhaswary. 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur>., diakses 20 Januari 2025.

Jayani, Dwi H. “Realisasi Investasi Indonesia 2019 Naik 48,4% dalam 5 Tahun.” *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/realisasi-investasi-indonesia-2019-naik-484-dalam-5-tahun>, diakses, 4 Februari 2025.

Salim, Wilmar dan Siwage Dharma Negara. "Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies". *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond*, Ed. Hal Hill and Siage Dharma Negara, Singapore: ISEAS Publishing, 2019, <https://doi.org/10.1355/978914843102-012>., diakses pada 23 Januari 2025.